

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi suatu pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Ini dilakukan berdasarkan perencanaan strategis. Untuk mencapai jenis pertanggungjawaban ini, sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan dapat diukur harus dibuat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya manusia yang berpengalaman juga sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, upaya pengembangan dan reformasi diperlukan, terutama dalam akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan.

Untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, pegawai SKPD harus memahami Standar Akuntansi Pemerintah, memiliki pendidikan akuntansi, dan mengikuti pelatihan akuntansi. Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penilaian informasi keuangan. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah kota dan daerah akan disebabkan oleh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan data keuangan untuk membuat keputusan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah adalah aturan yang harus diterapkan saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika Anda menyusun laporan keuangan, Anda tidak melanggar peraturan dan membuat laporan keuangan yang Anda buat dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi Keuangan Negara. (Udiyanti et al., 2014).

Pada akuntansi pemerintahan, khususnya bagian keuangan di kantor sekretariat daerah kota Palembang, ada perubahan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, SIKD adalah sistem informasi keuangan daerah, tetapi sekarang SIPD adalah sistem informasi pemerintahan daerah. Fatoni, salah satu karyawan di bagian perencanaan dan keuangan sekretariat daerah kota Palembang, menjelaskan bahwa "Sistem Informasi Keuangan Daerah Fatoni menyatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau dan dipantau oleh SIPD. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu dan membina daerah. Dengan demikian, Kemendagri mengapresiasi dan mendukung penggabungan

pengelolaan dana otonomi khusus dengan SIPD. "Kemendagri mendukung upaya penggabungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan modul Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sistem Informasi Keuangan."

Dengan demikian, maka diharapkan bentuk dan isi laporan keuangan daerah disusun dan disajikan secara andal dan relevan sesuai standar akuntansi pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak berkepentingan akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, data dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Untuk membuat laporan keuangan yang baik, Anda harus menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah selain memahami standar akuntansi pemerintah. Untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan terbuka, penggunaan teknologi informasi harus dilakukan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah digunakan mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah. Hasilnya adalah laporan keuangan, yang berisi informasi yang nantinya dapat digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, Sekretariat Daerah Kota Palembang telah banyak memanfaatkan teknologi informasi. Ini telah membuat sistem informasi yang menyimpan informasi keuangan daerah yang dapat diakses, dikendalikan, dan digunakan oleh masyarakat umum. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang dapat mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah dan memberikan informasi keuangan daerah yang luas kepada masyarakat umum. (Yani, 2008). Penyusunan laporan keuangan adalah langkah terpenting yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengetahui seberapa baik atau buruk kinerjanya dalam jangka waktu tertentu.

Fenomena Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD,

hal ini berarti laporan keuangan suatu pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Pada semester I tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memeriksa sebanyak 527 laporan keuangan, yang terdiri atas 91 laporan keuangan dilingkungan pemerintah pusat, 430 Laporan keuangan pemerintahan Daerah (LKPD), serta 6 laporan badan lainnya, termasuk BUMN. Dalam pemeriksaan keuangan lingkungan pemerintah, BPK telah memeriksa 426 LKPD tahun 2021 dari 524 pemerintahan daerah dan 4 LKPD tahun 2020.

Hasil BPK atas LKPD provinsi menunjukkan kasus- kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp.21,44 miliar. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp.9.09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp.108,08 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester 1 tahun 2012 juga menunjukkan kasus – kasus pemeriksaan yang telah terjadi antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp.230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 322 kasus senilai Rp.72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp. 119,56 miliar. Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan cara mempertimbangkan terhadap kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2014 dalam Indriasih dan Koeswayo, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita yanti (2022), tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut atau penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu organisasi perangkat daerah sedangkan objek di penelitian ini khusus bagian perencanaan dan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Palembang serta untuk lokasi yang berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu dengan lokasi kabupaten tanjong timur sedangkan peneliti ini di kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan daerah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Sehingga diperlukan pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah daerah terutama pada bagian keuangan agar kualitas informasi keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai akurat. Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Kota Palembang?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan di atas dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Menganalisis Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan gambaran kepada pihak pemerintah mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang terkait dengan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan sebagai bekal untuk menulis penelitian selanjutnya.

3. Bagi akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul dan juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yang akan ditulis secara sistematis agar dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.